

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017-2024

Nihayatuz Zain Sindi¹, Kartika Berliani²

Department of Accounting, Universitas Indonesia Membangun

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Daerah

Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung pada periode 2017–2024. Kebaruan penelitian terletak pada pemanfaatan data pascapandemi dan analisis simultan terhadap tiga instrumen fiskal utama untuk menilai efektivitas kebijakan keuangan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, berdasarkan data time series yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dari BPS dan DJPK. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda yang didahului oleh serangkaian uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara Belanja Daerah berpengaruh positif, dan Belanja Modal justru menunjukkan pengaruh negatif. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berperan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi Belanja Daerah, serta perbaikan kualitas pengelolaan Belanja Modal agar kebijakan fiskal daerah dapat lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), Regional Expenditure, and Capital Expenditure on Economic Growth of the City of Bandung in the 2017–2024 period. The novelty of the research lies in the use of post-pandemic data and simultaneous analysis of three main fiscal instruments to assess the effectiveness of regional financial policies in boosting economic activity. The research uses a quantitative method with a descriptive and verifiable approach, based on time series data collected through documentation and literature studies from BPS and DJPK. The analysis was carried out through multiple linear regression preceded by a series of classical assumption tests. The results of the study show that PAD does not have a significant influence on economic growth, while Regional Expenditure has a positive effect, and Capital Expenditure actually shows a negative influence. Simultaneously, these three variables have been proven to play a role in explaining the dynamics of economic growth in the city of Bandung. These findings emphasize the need to optimize PAD, improve the efficiency of Regional Expenditure, and improve the quality of Capital Expenditure management so that regional fiscal policies can be more effective in encouraging sustainable economic growth

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nihayatuz Zain Sindi

Department of Accounting, Universitas Indonesia Membangun,

Jl. Soekarno-Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266, Indonesia

Email: nihayatuz.inaba.ac.@student.inaba.ac.id

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui aktivitas produktif dalam suatu periode. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ketika balas jasa riil atas penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu ukuran utama yang digunakan untuk menilai dinamika tersebut adalah pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil (Berliani, 2016). Secara nasional, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Namun demikian, meskipun Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, kinerja Provinsi Jawa Barat justru menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan 4,95%, masih berada di bawah

capaian nasional maupun target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebesar 5,67% (Detik.com, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjalankan berbagai kebijakan fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Belanja Modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan agar pendapatan dan belanja pemerintah dapat diarahkan secara tepat untuk mendukung pembangunan (Hida et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan berupa penerimaan PAD yang belum optimal dan pola realisasi belanja yang tidak konsisten. Berbagai laporan daerah menegaskan bahwa optimalisasi PAD serta efisiensi penggunaan APBD menjadi faktor penting bagi peningkatan kinerja ekonomi daerah (Bandungutama, 2024).

Untuk memahami dinamika fiskal Kota Bandung secara lebih komprehensif, berikut disajikan data perkembangan PAD, Belanja Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi selama periode 2017-2024.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (%)	Belanja Daerah (%)	Belanja Modal (%)	Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB atas Harga Konstan) (%)
2017	84,12	80,81	56,37	7,21
2018	75,69	84,46	71,78	7,07
2019	83,41	88,64	104,50	6,79
2020	61,80	70,24	43,60	-2,28
2021	66,53	86,57	87,63	3,76
2022	87,01	96,35	123,93	5,41
2023	83,37	87,54	119,30	5,07
2024	89,62	86,87	77,87	4,99

(sumber diolah dari <https://jabar.bps.go.id/> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>)

Data pada tabel tersebut menunjukkan fluktuasi signifikan baik pada variabel fiskal maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang mencapai 7,21% pada tahun 2017 terus menurun hingga 6,79% pada tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi tajam menjadi -2,28% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, capaian tahun 2024 masih belum kembali ke tingkat pra-pandemi. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan, termasuk pengelolaan PAD, Belanja Daerah, dan Belanja Modal, belum sepenuhnya efektif dalam menopang aktivitas ekonomi secara stabil.

Variabel fiskal daerah juga menunjukkan ketidakstabilan. PAD mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, menggambarkan lemahnya kemandirian fiskal pada masa krisis. Belanja Daerah menurun drastis pada tahun yang sama akibat refocusing anggaran pandemi, sementara Belanja Modal – yang merupakan instrumen penting investasi pemerintah – menurun jauh dari 104,50% pada 2019 menjadi hanya 43,60% pada 2020. Ketidakkonsistenan dalam realisasi belanja tersebut berpotensi menghambat pembangunan ekonomi daerah, terutama karena belanja modal kerap memiliki efek jangka panjang terhadap kapasitas produksi dan kegiatan ekonomi.

Selain fenomena empiris tersebut, terdapat pula ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya terkait pengaruh PAD, Belanja Daerah, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif, sementara penelitian lain menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan (Meilina et al., 2025; Laodini et al., 2023; Sugandi et al., 2024; Firmansyah et al., 2022; Waspada Meliala et al., 2025). Ketidaksamaan hasil ini menunjukkan adanya gap empiris yang perlu diuji lebih lanjut, terutama dalam konteks Kota Bandung dengan dinamika fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh bagaimana PAD, Belanja Daerah, dan Belanja Modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, baik secara sendiri-sendiri maupun ketika ketiganya dilihat secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas instrumen fiskal daerah, tetapi juga menjadi masukan yang bernilai bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan merancang kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu. Menurut Muttaqin (2018), pertumbuhan ekonomi merupakan komponen fundamental dalam kebijakan ekonomi karena mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu meningkatkan output dan pendapatan masyarakat. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi diidentifikasi sebagai perubahan kuantitatif dalam total produksi barang dan jasa yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil per kapita. PDRB mencerminkan nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu dan menjadi alat utama untuk menilai dinamika aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan, seperti kapasitas fiskal, kualitas infrastruktur, struktur ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara produktif. Arsyad (2019) serta Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa kebijakan fiskal, termasuk pendapatan daerah dan belanja publik, menjadi salah satu determinan penting karena mampu mendorong investasi pemerintah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing wilayah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak sekadar mencerminkan peningkatan angka output, tetapi juga menggambarkan efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya fiskal untuk memperluas kapasitas produksi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan pendapatan yang dikumpulkan daerah melalui ketentuan yang ditetapkan sendiri dalam peraturan daerah. PAD mencerminkan kemampuan dan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Sumber PAD mencakup berbagai penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lain yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Menurut Siregar (2017), PAD merupakan instrumen penting yang memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi lokal dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal. Literatur lebih mutakhir seperti Fitriani dan Syarif (2025) serta Rahmawati dan Yusuf (2022) turut menekankan bahwa PAD memiliki peran krusial dalam memperkuat ruang fiskal sehingga daerah dapat melaksanakan program pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

Secara teoretis, PAD memiliki mekanisme transmisi yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD memperluas kapasitas belanja daerah karena pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program strategis lainnya. Pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah juga memberikan insentif bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik demi menarik kegiatan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, PAD dapat menciptakan efek multiplier fiskal karena belanja pemerintah yang dibiayai oleh pendapatan sendiri cenderung memiliki dampak lebih kuat terhadap konsumsi, investasi, dan aktivitas usaha lokal. Dengan demikian, PAD berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah,

tetapi juga sebagai indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayahnya untuk mendorong pertumbuhan.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengurangi ekuitas dana umum daerah tanpa memberikan penerimaan kembali. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa belanja daerah mencakup pembiayaan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dalam kajian ekonomi publik, terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan perilaku belanja pemerintah. Hukum Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya kebutuhan akan layanan publik dan infrastruktur. Sebaliknya, pandangan Keynesian menekankan bahwa belanja pemerintah dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, terutama dalam kondisi perlambatan ekonomi.

Penelitian empiris terbaru seperti Putra dan Hidayat (2021) serta Amalia dan Gunawan (2023) menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola anggaran, perencanaan program, serta proporsi belanja produktif yang dialokasikan oleh pemerintah. Dari perspektif teoritis, belanja daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, perluasan akses masyarakat terhadap layanan publik, penciptaan lapangan kerja jangka pendek, dan peningkatan produktivitas jangka panjang. Belanja pemerintah juga menghasilkan multiplier effect yang mampu meningkatkan pergerakan sektor usaha dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah yang diarahkan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Menurut Endayani dan Berliani (2023), belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jaringan air bersih, dan aset berwujud lainnya. Peran strategis belanja modal ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa belanja modal harus menghasilkan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berfungsi sebagai investasi pemerintah bagi pembangunan daerah.

Dalam perspektif teori ekonomi publik dan teori pertumbuhan endogen, belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah. Belanja modal mampu menurunkan biaya transaksi, memperbaiki konektivitas antarwilayah, menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Literatur empiris terbaru seperti Meliala et al. (2025) dan Yusuf dan Darma (2021) menunjukkan bahwa belanja modal yang diimplementasikan secara efisien dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan anggaran, keberlanjutan proyek, dan pengawasan pelaksanaan.

Secara keseluruhan, belanja modal merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang tidak hanya menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Secara teoritis, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan fiskal dan kemandirian daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Peningkatan ini memungkinkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan agendanya, sehingga mengurangi

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan berpotensi mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh ini menunjukkan adanya ketidakonsistenan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilina et al., (2025), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan Laodini et al., (2023), yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka taraf keterkaitan fiskal daerah ke pusat akan berkurang, dan daerah akan lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan agenda daerahnya guna untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan strategi fiskal kunci untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Apabila pengelolaan belanja daerah dilakukan secara efektif, terkhusus jika lebih banyak dialokasikan untuk sektor produktif dan dilaksanakan dengan efisien, maka hal tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Meskipun demikian, seperti halnya PAD, hasil penelitian terkait Belanja Daerah juga menunjukkan hasil yang beragam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugandi et al., (2024), menunjukkan bahwa Belanja Daerah berdampak positif signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al., (2022), menyatakan bahwa Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi dalam struktur anggaran, prioritas belanja, efisiensi penggunaan dana, serta kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan mencakup perolehan tanah, gedung, peralatan, hingga aset tak berwujud. Belanja ini dianggap sebagai bentuk investasi pemerintah yang krusial karena berperan penting dalam menciptakan aset tetap, membangun infrastruktur, serta sarana yang menunjang aktivitas ekonomi jangka panjang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Waspada Meliala et al., (2025), menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Laodini et al., (2023), menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang beragam antar penelitian. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena perbedaan efektivitas penggunaan belanja modal di tiap daerah, serta jenis investasi publik yang dilakukan pemerintah daerah. Apabila belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang produktif dan berkelanjutan, maka akan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah. Namun, apabila pengelolaan belanja modal kurang efisien atau tidak tepat sasaran, maka belanja tersebut justru dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Belanja Modal diposisikan sebagai variabel yang bersama-sama (secara kolektif) memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Interaksi ketiga variabel ini menjadi fokus utama dalam analisis efektivitas kebijakan keuangan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi regional. PAD menyediakan sumber daya finansial, Belanja Daerah mengalokasikan sumber daya tersebut untuk berbagai program, dan Belanja Modal fokus pada investasi jangka panjang dalam aset produktif dan infrastruktur. Dengan demikian, kualitas dan kuantitas dari ketiga unsur ini secara bersama-sama menentukan seberapa stabil dan berkelanjutan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meskipun hasil penelitian spesifik untuk Kota Bandung periode 2017-2024 masih berupa hipotesis, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi variabel-variabel ini (walaupun dengan sedikit perbedaan komposisi variabel) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi kepustakaan, lokasi penelitian di Pemerintah Kota Bandung, serta sampel berupa data time series selama delapan tahun yang diperoleh dari BPS dan DJPK.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data, uji heteroskedastisitas untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians residual, uji multikolinearitas untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen, serta uji autokorelasi untuk melihat hubungan residual antarperiode. Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variabel dependen, uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Operasional Tabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator / Pengukuran	Skala
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang diukur melalui perubahan output dari waktu ke waktu (Muttaqin, 2018).	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan: $[(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	PAD adalah pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (Rafi & Arza, 2023).	Nilai realisasi PAD menurut Laporan Realisasi Anggaran 2017-2024	Nominal
Belanja Daerah (X2)	Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang mengurangi ekuitas dana umum dalam satu periode anggaran (Mahmudi, 2019).	Nilai realisasi belanja daerah menurut Laporan Realisasi Anggaran 2017-2024	Nominal
Belanja Modal (X3)	Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (Mahmudi, 2019).	Nilai realisasi belanja modal menurut Laporan Realisasi Anggaran 2017-2024	Nominal

HASIL PENELITIAN

Metode Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Mean	Std. Deviation	N
------	----------------	---

Pertumbuhan Ekonomi	4.7525	3.08434	8
Pendapatan Asli Daerah	78.6663	9.80141	8
Belanja Daerah	85.1850	7.46341	8
Belanja Modal	85.9975	26.88468	8
Valid N (listwise)			8

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 dengan standar deviasi 3,08 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar-observasi. Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata 78,67 dengan standar deviasi 9,80 yang menandakan nilai PAD relatif stabil antarperiode. Belanja daerah memiliki rata-rata 85,19 dan standar deviasi 7,46, menunjukkan tingkat variasi yang rendah atau cenderung konsisten antar-observasi. Sementara itu, belanja modal memiliki rata-rata 85,99 dengan standar deviasi 26,88, yang menunjukkan adanya perbedaan cukup besar dalam pengalokasian belanja modal. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal cenderung berfluktuasi, sedangkan pendapatan asli daerah serta belanja daerah relatif stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Variabel	Unstandardized Residual
N	8
Normal Parameters	
Mean	0.0000000
Std. Deviation	1.12935206
Most Extreme Differences	
Absolute	0.127
Positive	0.127
Negative	-0.116
Test Statistic	0.127
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200c,d

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan output uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Artinya, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga data layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut. Tidak terdapat indikasi penyimpangan distribusi residual yang dapat mempengaruhi validitas model.

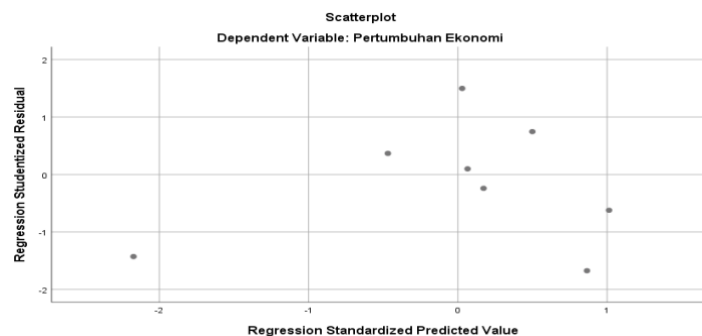
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	0.590	1.696
Belanja Daerah	0.110	9.116
Belanja Modal	0.117	8.534

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Belanja Modal memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, masing-masing Pendapatan Asli Daerah (Tolerance 0,591; VIF 1,691), Belanja Daerah (Tolerance 0,110; VIF 9,116), dan Belanja Modal (Tolerance 0,117; VIF 8,534). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak mengalami multikolinearitas, sehingga model regresi layak digunakan karena antar variabel independen tidak saling mempengaruhi secara kuat.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot

Berdasarkan hasil scatterplot antara nilai Regression Standardized Predicted Value dan Regression Studentized Residual, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu seperti mengerucut atau melebar. Pola sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.930 ^a	0.865	0.764	1.49811	2.287

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2,287 dan nilai du sebesar 2,2866, maka nilai Durbin-Watson berada pada rentang $du < DW < 4 - du$, yaitu $2,2866 < 2,287 < 1,7134$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, baik positif maupun negatif pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, asumsi autokorelasi terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Analisis Regresi Linear

Tabel 7. Perhitungan Uji regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-54.692	14.057		-3.891	0.018
Pendapatan Asli Daerah	0.169	0.075	0.538	2.251	0.088
Belanja Daerah	0.716	0.229	1.732	3.124	0.035
Belanja Modal	-0.173	0.062	-1.504	-2.805	0.049

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan table 8 diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -54,692 + 0,169X_1 + 0,716X_2 - 0,173X_3 + e$$

Dari persamaan regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar -54,692 menggambarkan kondisi hipotetis ketika seluruh variabel independen berada pada nilai nol, sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada angka negatif tersebut sebelum dipengaruhi faktor fiskal daerah. Koefisien Pendapatan Asli Daerah bernilai positif 0,169, yang berarti peningkatan PAD cenderung diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Belanja Daerah memiliki koefisien terbesar, yaitu 0,716, menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah memberikan dorongan paling

kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Belanja Modal memiliki koefisien negatif sebesar -0,173, mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal justru berkaitan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, kemungkinan karena adanya *time lag* atau ketidakefisienan pelaksanaan proyek.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi Person (*Product Moment*)

		Correlations			
		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	0.640	0.608	.732*
	Sig. (2-tailed)		0.087	0.110	0.039
	N	8	8	8	8
Belanja Daerah	Pearson Correlation	0.640	1	.940**	0.663
	Sig. (2-tailed)	0.087		0.001	0.073
	N	8	8	8	8
Belanja Modal	Pearson Correlation	0.608	.940**	1	0.450
	Sig. (2-tailed)	0.110	0.001		0.263
	N	8	8	8	8
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	.732*	0.663	0.450	1
	Sig. (2-tailed)	0.039	0.073	0.263	
	N	8	8	8	8

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi ($r = 0,732$; Sig. = 0,039). Artinya, semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula dorongan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ditemukan juga hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara belanja daerah dan belanja modal ($r = 0,940$; Sig. = 0,001), yang menggambarkan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung diikuti dengan peningkatan belanja modal. Kedua temuan ini menegaskan bahwa aspek pendapatan dan pengelolaan belanja pemerintah memiliki keterkaitan yang relevan dalam mendukung aktivitas pembangunan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Durbin-Watson
1	2.287

Hasil uji Model Summary menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,764. Artinya, sekitar 76,4% perubahan yang terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh tiga variabel yang diteliti, yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah. Sementara itu, 23,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,930 juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor fiskal yang dianalisis memiliki peranan penting dalam menjelaskan dinamika ekonomi daerah.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-54.692	14.057		-3.891	0.018		
Pendapatan Asli Daerah	0.169	0.075	0.538	2.251	0.088	0.590	1.696
Belanja Daerah	0.716	0.229	1.732	3.124	0.035	0.110	9.116
Belanja Modal	-0.173	0.062	-1.504	-2.805	0.049	0.117	8.534

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, namun nilai signifikansinya masih di atas 0,05. Hal ini menandakan bahwa meskipun arah pengaruhnya positif, PAD tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Belanja Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan karena nilai t hitung melebihi t tabel dan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, sehingga peningkatan belanja pemerintah daerah secara langsung mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan itu, Belanja Modal menunjukkan pengaruh signifikan tetapi bernilai negatif, yang berarti peningkatan belanja modal justru berkaitan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian, kemungkinan karena sifat investasinya yang membutuhkan waktu sebelum memberi dampak produktif.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	57.615	3	19.205	8.557	.033 ^b
Residual	8.977	4	2.244		
Total	66.592	7			

Sumber: Hasil olah data SPSS for windows versi 25.00

Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,557 dengan Ftabel sebesar 6,59 serta nilai signifikansi $0,033 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga model regresi dapat dinyatakan signifikan secara simultan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini berarti model yang digunakan layak dan variabel independen memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PAD memiliki hubungan korelasional yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, variabel ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial dalam model regresi. Temuan ini penting untuk ditelaah lebih dalam dari sisi teori maupun konteks fiskal Kota Bandung. Secara teoretis, PAD merupakan indikator kemandirian fiskal daerah yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan melalui peningkatan kapasitas belanja pemerintah, perbaikan layanan publik, serta efek multiplier terhadap aktivitas ekonomi lokal. Namun, kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bandung selama 2017–2024 relatif terbatas karena proporsi PAD hanya menjadi salah satu komponen dalam struktur pendapatan yang didominasi oleh dana transfer. Ketergantungan ini mengurangi daya dorong PAD dalam memengaruhi variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, PAD Kota Bandung juga memiliki komposisi yang masih didominasi oleh pajak daerah berbasis konsumsi, seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan. Selama masa pandemi COVID-19, sektor-sektor ini mengalami kontraksi tajam sehingga potensi PAD menurun signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan PAD tidak mampu berperan sebagai penopang stabilitas fiskal daerah dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Laodini et al. (2023) yang menyatakan bahwa PAD di beberapa daerah kurang efektif mendorong pertumbuhan ketika struktur penerimaannya tidak berbasis

aktivitas produktif sektor riil. Dengan demikian, ketidaksignifikanan PAD dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, ketergantungannya pada sektor konsumsi yang sensitif terhadap guncangan ekonomi, serta alokasi PAD yang cenderung masuk ke belanja operasional daripada belanja produktif.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Temuan ini konsisten dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan permintaan agregat. Belanja daerah Kota Bandung selama 2017–2024 relatif stabil dan mengalami peningkatan pada program pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan sektor-sektor prioritas kota seperti infrastruktur perkotaan, sosial, dan ekonomi kreatif. Hal ini menyebabkan belanja pemerintah mampu memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Belanja daerah juga mencerminkan peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang menjadi prasyarat pertumbuhan jangka panjang. Meskipun beberapa penelitian seperti Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa belanja daerah tidak selalu berpengaruh signifikan di seluruh wilayah Indonesia, hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas belanja sangat bergantung pada komposisi serta kualitas implementasinya. Di Kota Bandung, belanja yang relatif stabil bahkan pada masa pandemi – karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial – mampu mempertahankan aktivitas ekonomi hingga masa pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan belanja daerah dalam penelitian ini mencerminkan efektivitas strategi fiskal Kota Bandung dalam menjaga stabilitas ekonomi selama periode fluktuatif pasca pandemi.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tampak kontradiktif terhadap teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa investasi pemerintah melalui belanja modal dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, efek negatif ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teoritis dan kondisi empiris Kota Bandung.

Pertama, dalam teori ekonomi fiskal terdapat fenomena time lag, di mana belanja modal membutuhkan waktu cukup panjang untuk memberikan dampak terhadap output ekonomi. Infrastruktur yang dibangun pada tahun berjalan belum tentu langsung menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi. Hal ini sangat terasa pada periode pandemi, ketika banyak proyek infrastruktur sempat tertunda, direalokasi, atau mengalami kontraksi pembiayaan. Kedua, struktur belanja modal Kota Bandung pada beberapa tahun tertentu menunjukkan volatilitas tinggi, misalnya penurunan tajam pada tahun 2020 dan kenaikan tidak merata pada tahun berikutnya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya persoalan efisiensi dan keberlanjutan proyek, sehingga belanja modal lebih banyak membebani biaya fiskal jangka pendek daripada menghasilkan manfaat ekonomi langsung.

Penelitian ini juga sejalan dengan Laodini et al. (2023) yang menemukan bahwa belanja modal berpotensi berdampak negatif ketika mengalami ketidakefisienan, keterlambatan proyek, atau fokus pada pembangunan fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produktif masyarakat. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa efektivitas belanja modal sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, keberlanjutan proyek, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Pengaruh PAD, Belanja Daerah, dan Belanja Modal secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara simultan, PAD, belanja daerah, dan belanja modal terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa ketiga variabel fiskal tersebut merupakan determinan penting yang menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini memperkuat teori ekonomi regional yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kinerja ekonomi terutama melalui alokasi pendapatan dan belanja yang efektif.

Namun demikian, kontribusi masing-masing variabel berbeda-beda. Belanja daerah merupakan variabel yang memberikan dampak langsung paling konsisten, sementara PAD dan belanja modal menunjukkan efektivitas yang bergantung pada struktur penerimaan, kualitas pengelolaan, dan kondisi makroekonomi seperti pandemi dan pemulihan. Dengan demikian, model simultan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai instrumen fiskal, bukan hanya dari satu variabel secara parsial.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika fiskal daerah memiliki peranan penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama periode 2017–2024. Sintesis hasil menunjukkan bahwa Belanja Daerah merupakan instrumen fiskal yang paling konsisten memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga memperkuat pandangan Keynesian mengenai pentingnya belanja pemerintah sebagai pendorong permintaan agregat. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi signifikan, yang mencerminkan masih terbatasnya kapasitas kemandirian fiskal dan struktur PAD yang didominasi sektor konsumtif serta rentan terhadap guncangan pandemi. Sementara itu, pengaruh negatif Belanja Modal mengonfirmasi adanya *time lag* investasi pemerintah dan persoalan efisiensi dalam implementasi proyek, sebagaimana menjadi salah satu gap empiris dalam penelitian sebelumnya.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai efektivitas instrumen fiskal daerah dengan memberikan bukti terbaru pasca pandemi serta menunjukkan bahwa dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan menegaskan pentingnya konteks fiskal lokal dalam menentukan efektivitas kebijakan.

Implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Bandung adalah perlunya memperkuat struktur PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan yang lebih produktif, meningkatkan kualitas belanja daerah khususnya program yang mendukung sektor riil, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan efektivitas belanja modal agar manfaat ekonominya dapat muncul secara lebih cepat dan berkelanjutan. Optimalisasi ketiga instrumen fiskal tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan variabel yang hanya mencakup tiga instrumen fiskal serta periode penelitian yang relatif singkat dan berada dalam fase guncangan pandemi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memasukkan variabel makro lain seperti investasi swasta, tenaga kerja, inflasi, atau indeks pembangunan daerah, serta memperluas periode observasi agar pola jangka panjang dapat terlihat lebih jelas. Pendekatan metode panel data antar kota/kabupaten juga disarankan untuk memperoleh gambaran komparatif efektivitas kebijakan fiskal di berbagai daerah.

REFERENSI

- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal-Inaba. Hol. Es*, 15(2). <http://jurnal-inaba.hol.es/>
- Berliani, K. (2022). The Effect Of Regional Taxes, Regional Levies, General, Allocation Funds, Special Allocation Funds On Capital Expenditures In Regencies/Cities In West Java Province 2014-2021. *Journal of Accountancy Inaba (JAI)*, 01(01). <https://doi.org/10.56956/jai.v1i1.13>
- manEndayani, F., & Berliani, K. (2023). Predictors Of Capital Expenditures In Regency/City Regional Government In West Java Province 2017-2022. *Journal of Accounting INABA(JAI)*, 02(02).

- <https://doi.org/10.56956/jai.v2i02.247>
- Firmansyah, H., Anjani, Nadia, A., Nurdianti, D., Miharja, Danu, Amalia, Nur, L., Agustina, N., & Hariadi, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 02, hlm. 43-61.
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *JURNAL MANEKSI*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2200>
- Laodini, A., Rorong, F, Pingka, I., & Tumangkung, Y.L, S. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.
- Mankiw. (2020). *Topics for Further Study The Economics of Labor Markets Firm Behavior and the Organization of Industry*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPIN.
- Meilina, E., Tewernusa, Imelda, K., & Parinusa, Maria, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Barat Pada Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 12 Kabupaten 1 Kota). *Lensa Ekonomi*, 19(e-ISSN: 2623-0895; p-ISSN: 1858-490X), p 38-53.
- Muttaqin, R. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif islam*.
- Nurul Fitriani, & Devyanthi Syarif. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *eCo-Fin: Economics and Financial*, 7(1), 335-348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 411-427. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>
- Ruslan, R. (2016). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta UPP STIM.
- Sugandi, A., Nariyah, H., & Nursahidin. (2024). Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(p-ISSN: 2745-7141 e-ISSN: 2746-1920). <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6318>.
- Waspada Meliala, Dhefut Riansyah Firman Ardian, & Virgilio Cancera Meliala. (2025). Analisis Belanja Modal Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jayapura. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 803-813. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i1.4874>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.